

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang oleh pendidik yang profesional dan kompeten agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, faktor pendidik menjadi indikator yang sangat penting sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.<sup>2</sup> Pendidik sebagai tenaga profesional tentunya harus dilengkapi dengan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki sembarang orang.

Peran pendidik dalam menciptakan pendidikan berkualitas sangat penting, sebab memiliki hubungan langsung dengan obyek pendidikan, yaitu siswa dan proses pembelajaran. Hal ini karena pendidik mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang harus dimiliki guru adalah kompetensi atau kemampuan sebagai pendidik, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>4</sup> Dari empat jenis kompetensi yang dipersyaratkan Undang-Undang, kompetensi yang terkait langsung dengan pembelajaran adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.<sup>5</sup>

Kompetensi pedagogik disebut pula dengan istilah kompetensi akademik. Yang termasuk dalam kompetensi ini adalah kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan siswa sebagai individu yang kreatif.<sup>6</sup> Dengan demikian, kompetensi ini merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki para pendidik. Tanpa kemampuan ini, pembelajaran tidak bisa berlangsung secara efektif dan memberikan hasil yang optimal. Namun, profesionalitas seorang pendidik ternyata tidak cukup hanya dengan kompetensi pedagogik semata. Banyak pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, baik secara teori, konsep maupun implementasi, tetapi tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Karena inilah, diperlukan pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan bimbingan. Kewenangan semacam ini dimiliki Kepala Sekolah dalam bentuk kegiatan supervisi pendidikan.

Mulyasa menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (2).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 10.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Penjelasan Pasal 10.

<sup>6</sup> Sumiati dan Asra, *Metode Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2008), hlm. 242.

peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif.<sup>7</sup> Dengan demikian, supervisi yang dilakukan Kepala Sekolah hendaknya mampu melakukan berbagai pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan.

Pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan supervisi Kepala Sekolah dimaksudkan sebagai tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan pembinaan dalam kegiatan supervisi Kepala Sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Paparan teori tersebut memberikan pemahaman bahwa kecuali kompetensi yang dimiliki oleh pendidik, keterjaminan mutu pendidikan juga ditentukan oleh supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Namun demikian, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan, baik yang dilakukan pengawas sekolah maupun kepala sekolah, masih jauh dari konsep dan teori supervisi yang ideal. Pelaksanaan supervisi yang berlangsung selama ini masih cenderung berbentuk inspeksi atau pengawasan saja. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas juga tidak rutin serta terkesan mencari-cari kesalahan dari guru. Hal ini menjadi lebih parah dengan budaya pemberian amplop kepada pengawas oleh pihak sekolah. Pihak sekolah berharap supaya aman dalam arti pengawas tidak akan mencari-cari kesalahan. Realita yang ada menunjukkan pada saat melakukan pengawasan, sering kali pengawas setelah menerima amplop langsung pulang dan tidak melakukan supervisi. Kondisi ini diperparah lagi dengan masih rendahnya kompetensi pengawas berkaitan dengan supervisi. Hal ini menyebabkan kualitas pengajaran tidak bertambah baik, tetapi *stagnan* bahkan mengalami kemunduran.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, cet. ke-5, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 111.

<sup>8</sup> J Widodo, *Supervisi Guru Mata Pelajaran Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi Unnes, 2007, hlm. 308.

Kondisi pelaksanaan supervisi di Indonesia oleh kepala sekolah juga tidak jauh berbeda dengan supervisi oleh pengawas. Supervisi oleh kepala sekolah juga masih jauh dari harapan dan konsep ideal. Sikap *ewuh pekewuh* antara kepala sekolah dengan guru mengakibatkan kepala sekolah tidak mau masuk terlalu jauh pada wilayah guru. Sebaliknya, pihak guru juga merasa sungkan bahkan takut untuk terbuka terhadap kepala sekolah pada saat pelaksanaan supervisi.

Budaya paternalistik di Indonesia mengakibatkan komunikasi antara guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor tidak terbuka. Guru menganggap kepala sekolah adalah “atasan” dan sebaliknya kepala sekolah menganggap guru sebagai “bawahan”. Kondisi ini mengakibatkan jalinan hubungan antara guru dengan kepala sekolah tidak akrab, sehingga untuk berdiskusi secara terbuka juga terhambat. Padahal secara teoritis hubungan yang akrab dan terbuka antara guru dengan supervisor merupakan salah satu syarat keberhasilan supervisi.<sup>9</sup>

Kinerja guru yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas dan relevansi pendidikan, dalam implementasinya di lapangan tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya dan saling berkaitan, misalnya faktor kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja. Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan mutu, tanpa kepemimpinan yang baik proses peningkatan mutu tidak dapat dilakukan dan diwujudkan<sup>10</sup>. Keutamaan pengaruh (*influence*) kepemimpinan kepala sekolah bukanlah semata-mata berbentuk instruksi, melainkan lebih merupakan motivasi atau pemicu (*trigger*) yang dapat memberi inspirasi bagi para guru dan karyawan, sehingga inisiatif dan kreatifitasnya berkembang secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya<sup>11</sup> antara lain masih minimnya kepala sekolah untuk melakukan kegiatan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 309 – 310.

<sup>10</sup> Edward Sallis, *Total Quality Manajemen In Education*, (Alih Bahasa : Ahmad Ali Riyadi), Jogjakarta, IRCiSoD, 2006, hlm. 170.

<sup>11</sup> Tjutju Yuniarsih dan Suwatno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 166.

supervisi dan tingkat kepuasan guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah masih rendah.

Kondisi lain yang memperparah efektif dan tidaknya supervisi kepala sekolah terhadap guru khususnya di lembaga pendidikan swasta adalah kebanyakan kepala sekolah diangkat bukan atas dasar kemampuan profesional, tetapi lebih karena senioritas dalam bekerja dan kepangkatan serta kedekatan dan kepercayaan yayasan terhadap yang bersangkutan. Pada beberapa tempat memang terdapat pola pemilihan kepala sekolah dengan model demokratis dimana kepala sekolah dipilih oleh entitas sekolah (guru dan karyawan). Tetapi pemilihan yang demokratis hanya memenangkan sisi pengaruh pribadi (*influence*) yang kuat calon terpilih, dan bukan kemampuan profesional kepala sekolah. Sedang pada sekolah negeri memang terdapat uji kompetensi calon kepala sekolah, namun pada proses ini masih sumir dengan praktik kolusif sehingga belum tentu melahirkan kepala sekolah yang berkompeten dalam memimpin sekolah.

Meskipun begitu, tidak sedikit sekolah swasta yang memiliki kepala sekolah yang berkompeten di bidangnya, minimal mampu memberikan pembinaan (supervisi) akademik terhadap guru tentang metode pembelajaran yang dilakukannya. Namun karena keterbatasan waktu dan minimnya gaji yang diberikan kepada guru menjadikan proses pembinaan kepala sekolah tersebut tidak dilakukan secara terstruktur dan didukung dengan administrasi sebagai alat rekam jejak proses supervisi itu sendiri.

Secara teoritik supervisi akademik yang menyangkut evaluasi pembelajaran guru di kelas berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, namun sejauh ini masih banyak ditemukan kesenjangan antara supervisi akademik, kualitas pembelajaran, dan hasil belajar. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari supervisi Kepala Sekolah yang belum efektif dan kualitas pembelajaran yang kurang memenuhi standar proses, namun dapat memberikan hasil belajar yang cukup tinggi pencapaiannya.

Supervisi yang tidak efektif memang tidak menjamin kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berpengaruh terhadap rendahnya

hasil belajar dalam arti nilai yang dicapai siswa dalam ujian akhir, baik ujian akhir sekolah maupun ujian nasional. Namun realitanya, walaupun tidak ada kegiatan supervisi dari Kepala Sekolah, kualitas pembelajaranpun juga masih jauh dari ideal, tetapi kelulusan peserta didik termasuk kategori sangat baik dan bahkan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari data kelulusan siswa MA tahun 2007 – 2010 yang disajikan Kementerian Agama RI sebagai berikut :

**Tabel 1**

Prosentase Kelulusan SMA dan MA Tahun 2007 - 2010<sup>12</sup>

Jurusan	Sekolah	2007	2008	2009	2010
BAHASA	SMA	91.79	90.37	88.99	98.37
	MA	92.75	89.54	90.86	98.27
IPA	SMA	95.38	94.4	96.72	99.69
	MA	92.31	91.61	94.21	99.48
IPS	SMA	91.07	89.72	92.1	98.81
	MA	88.77	91.19	90.71	98.74
TOTAL	SMA	92.75	91.5	92.6	98.96
	MA	91.28	90.78	91.92	98.83

Data tersebut menunjukkan tingkat kelulusan MA sangat tinggi dari tahun ke tahun mulai tahun 2007 – 2011. Poresntase kelulusan mendekati 100% dengan rasio ketidak lulusan kurang dari 10%. Apabila dihubungkan dengan proses belajar, data tersebut dapat dijadikan alasan untuk menarik kesimpulan bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan sekolah sangat berhasil. Meskipun banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah/madrasah tidak berjalan semestinya.

Apabila dicermati lebih jauh, ternyata angka kelulusan tersebut tidak dibarengi dengan tumbuhnya karakter dalam diri peserta didik. Padahal UU No. 20 Tahun 2003 telah menggariskan tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

<sup>12</sup> Asep Sjafrudin, *Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional MA untuk Perbaikan Akses dan Mutu Pendidikan*, diakses tanggal : Sunday, February 21, 201622:53:02

bertanggung jawab. Hanya saja, dalam kenyataan justru banyak peserta didik yang tidak berakhlak mulia, senang melakukan tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, tidak bertanggung jawab, dan tindakan lain yang justru bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Bukan saja pelajar, orang-orang yang berpendidikan dan memiliki jabatan publik juga tidak malu lagi melakukan korupsi dan mementingkan diri sendiri.

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa pendidikan kita belum mampu membangun karakter bangsa. Pendidikan telah dipersempit dengan persekolahan, yang kemudian dipersempit dengan pengajaran, dan dipersempit lagi dengan proses belajar mengajar di kelas, dan makin dipersempit lagi dengan pengajaran yang bersifat kognitif. Akibatnya sudah jelas pendidikan tidak menghasilkan pribadi yang utuh, tetapi hanya satu sisi kecil dari kepribadian yaitu “intelektualitas”. Pendidikan lebih mengutamakan sisi skolastik/akademik, dan melupakan segi-segi nilai serta kepribadian. Hal ini akan membaca dampak pada kondisi pendidikan yang dirasakan kurang bermutu, tidak adil, dan tidak merata.<sup>13</sup> Bahkan, Winarno Surakhmad mengatakan bahwa praksis pendidikan yang terjadi di kelas-kelas tidak lebih dari latihan-latihan skolastik, seperti mengenal, membandingkan, melatih, dan menghafal, yakni kemampuan kognitif yang sangat sederhana, di tingkat paling rendah.<sup>14</sup>

Penyempitan makna pendidikan sebagaimana dimaksud pernyataan dua orang ahli tersebut, menjadikan pendidikan hanya berorientasi pada aspek kognitif dan intelektual. Sedangkan unsur fundamental yang berakar pada nilai moral dari pendidikan itu sendiri terlupakan. Sehingga pendidikan hanya menghasilkan manusia yang skolastik dan pandai secara intelektual namun kurang memiliki keutuhan pribadi.

Fenomena pendidikan yang belum mampu membentuk karakter bangsa memang tidak serta merta kesalahan guru, tetapi juga kurikulum dan

---

<sup>13</sup> Mohammad Surya, *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 104.

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, et. al. *Mengurai Benang Kusut Pendidikan*, Jakarta: Transformasi, 2003, hlm. 114.

sistem pendidikan yang berlaku. Namun faktor guru yang merupakan subyek utama pendidikan memiliki peranan yang lebih penting daripada yang lain. Oleh karena itu, kinerja guru perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk bimbingan dalam pengelolaan pendidikan agar mampu membangun karakter pada diri peserta didik. Pihak yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan bimbingan adalah Kepala Sekolah sebagai supervisor pendidikan.

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa supervisi Kepala Madrasah lebih mengarah pada penegakan disiplin guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Sedangkan supervisi yang mengarah pada peningkatan mutu pembelajaran kurang mendapatkan perhatian. Beberapa guru di Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Pati menuturkan, bahwa mereka jarang sekali mendapatkan bimbingan dari Kepala Madrasah terkait peningkatan mutu kompetensi pedagogik. Kepala Madrasah lebih banyak mengawasi kedisiplinan guru daripada peningkatan mutu pembelajaran.<sup>15</sup> Beberapa Kepala Sekolah Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Pati membenarkan pernyataan tersebut. Mereka lebih memfokuskan kedisiplinan, karena merasa tidak lebih mampu daripada para guru dalam masalah pembelajaran. Pemilihan mereka menjadi kepala sekolah karena dipilih Pengurus Yayasan untuk memudahkan birokrasi.<sup>16</sup> Ada pula Kepala Madrasah yang dipilih melalui jalur tes, namun ternyata juga tidak banyak berbeda dengan yang dipilih langsung oleh Yayasan.<sup>17</sup>

Kegiatan supervisi Kepala Madrasah yang semestinya dilakukan dalam bentuk pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru, menjadi berbelok arah untuk menjaga kedisiplinan guru. Supervisi Kepala Sekolah yang seharusnya memiliki fungsi memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan

---

<sup>15</sup> Wawancara pribadi dengan beberapa orang guru Madrasah Aliyah di wilayah Kecamatan Margoyoso.

<sup>16</sup> Wawancara pribadi dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah di wilayah Kecamatan Cluwak.

<sup>17</sup> Wawancara pribadi dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah di wilayah Kecamatan Tayu.



kemampuan melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, beralih fungsi sebagai penegak tata tertib sekolah. Hal ini menyebabkan supervisi tidak terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip supervisi, yaitu demokratis, konstruktif, dan memberi perasaan aman kepada guru.

Berdasarkan studi awal melalui kegiatan observasi dan wawancara terhadap beberapa guru dan Kepala Madrasah Aliyah di Kabupaten Pati, sedikitnya ada dua permasalahan yang terkait dengan supervisi kepala sekolah, yaitu kompetensi dan *leadership*. Pada permasalahan kompetensi, Kepala Madrasah tidak mengetahui bahwa salah satu tugas kepala sekolah adalah melakukan supervisi, dan ada pula yang tidak memiliki kemampuan dalam melakukan supervisi. Karena itu, mereka sebagai Kepala Madrasah hanya merasa berkewajiban memimpin lembaga pendidikan agar berjalan sesuai dengan perencanaan, namun tanpa adanya bimbingan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi. Mereka hanya meminta pertanggungjawaban, tetapi tidak melakukan pembinaan.

Sedangkan pada permasalahan *leadership* terjadi pada Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi, tetapi tidak mampu atau lebih tepatnya tidak berani melakukan supervisi pendidikan secara ideal, karena faktor *unggah ungguh* dan *ewuh pekewuh*. Madrasah swasta yang masih banyak memiliki guru sepuh, yang notabene juga gurunya, menjadikan Kepala Madrasah tidak maksimal dalam menjalankan supervisi. Selain itu, ada pula kasus Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi sebagai supervisor serta rajin melakukan supervisi, tetapi malah tidak mendapatkan simpati dan dukungan dari guru. Kepala Madrasah seperti ini dianggap sebagai *sok pinter* dan *aji mumpung*, sehingga menimbulkan hubungan yang kurang kondusif antara guru dan kepala sekolah.<sup>18</sup>

Berdasarkan konsep ideal dan realitas yang terjadi sebagaimana telah dipaparkan, peneliti melaksanakan penelitian untuk mengkaji efektivitas

---

<sup>18</sup> Wawancara pribadi dengan beberapa orang guru dan Kepala Madrasah Aliyah di wilayah Kecamatan Margoyoso dan Tayu.

supervisi akademik yang dilakukan Kepala Madrasah terhadap guru di Madrasah Aliyah di eks Kawedanan Tayu, yang dibatasi dengan studi kasus di Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarajalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah pesatnya kemajuan yang diraih pada dekade terakhir ini. Sebenarnya madrasah berdiri pada tahun 1980, namun karena persaingan dengan madrasah-madrasah di sekitarnya, siswa madrasah ini tidak pernah lebih dari 15 siswa dalam satu kelas. Namun pada dekade terakhir ini pencapaian siswa madrasah ini meningkat tajam. Pada lima tahun terakhir ini siswa per kelas mencapai rata-rata 35 siswa. Kemajuan ini ditengarai dampak dari kepemimpinan Kepala Madrasah yang kebetulan memiliki kualifikasi sarjana strata dua bidang manajemen pendidikan Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji salah satu fungsinya sebagai Kepala Madrasah, yaitu supervisi akademik, dan efektifitasnya terhadap meningkatnya kompetensi pedagogik guru. Judul yang diambil adalah “*Efektivitas Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Se Eks Kawedanan Tayu (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Raudlatus Syubban Sekarajalak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar kajian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi adanya permasalahan yang perlu mendapatkan pemecahan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supervisi akademik kurang mendapatkan perhatian dari supervisor, baik Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah.
2. Masih banyak Kepala Sekolah yang kurang memahami tupoksinya sebagai supervisor pendidikan.
3. Masih ada beberapa Kepala Sekolah yang tidak memiliki kompetensi sebagai supervisor pendidikan.
4. Kinerja Guru lebih difokuskan pada peningkatan aspek kognitif.

5. Masih banyak Guru yang kurang memiliki kompetensi profesional terutama kompetensi pedagogik, yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan.
6. Pembelajaran lebih difokuskan pada pencapaian prestasi kognitif, dan kurang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan secara komprehensif.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasar pada permasalahan yang teridentifikasi, peneliti memfokuskan pembahasan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana supervisi akademik Kepala Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso Pati?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik Guru Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso Pati?
3. Bagaimana efektivitas supervisi akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui supervisi akademik Kepala Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso Pati.
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik Guru Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso Pati.
3. Untuk mengetahui efektivitas supervisi akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak Margoyoso Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan upaya mengetahui pelaksanaan tupoksi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban Sekarjalak. Untuk itu, manfaat yang diharapkan adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai rujukan bagi Kepala Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban untuk menyusun perencanaan supervisi akademik.
- b. Sebagai rujukan bagi Guru di Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban untuk meningkatkan kinerja.
- c. Sebagai bahan evaluasi bagi pengembang kepentingan pendidikan.
- d. Sebagai bahan telaah bagi peneliti yang akan datang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Mengevaluasi kegiatan supervisi Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban.
- b. Mengevaluasi kompetensi pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Raudlatusy Syubban.

## F. Sistematika Penyusunan

Tesis ini merupakan laporan hasil penelitian kualitatif yang akan disajikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal dari tesis ini meliputi halaman judul, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi merupakan bagian inti berisi 5 (lima) bab pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan sistematika penyusunan. Bab dua berisi landasan teori yang meliputi kajian supervisi kepala sekolah dan kompetensi guru. Bab tiga berisi metode penelitian yang digunakan. Bab empat merupakan pemaparan hasil penelitian. Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir tesis ini menyajikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan tesis ini.